

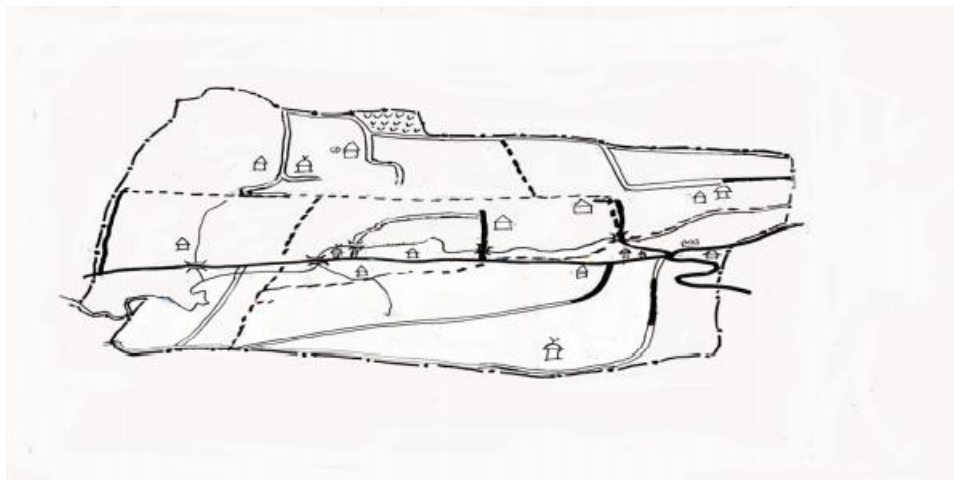
BAB IV PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Desa Bulangan Haji

Gambar 4.1

Peta Sketsa Desa Bulangan Haji



Sejarah Desa Bulangan Haji tidak terlepas dari sejarah masyarakat itu sendiri yang dahulu bernama Papuangan yang dalam Bahasa Indonesia adalah perkelahian atau pertempuran Ratu Pamekasan dengan Kek Lesap. Kemudian karena terlalu luas, Papuangan dipecah menjadi empat dan berubah menjadi Bulangan yakni Bulangan Timur, Bulangan Barat, Bulangan Branta, dan Bulangan Haji. Dinamakan Bulangan Haji karena pada waktu itu ada orang berangkat ke tanah suci Mekkah melaksanakan ibadah haji yang pertama kali di wilayah Bulangan.

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa pada tahun 2015, jumlah penduduk Desa Bulangan Haji adalah terdiri dari 1453 KK, dengan jumlah total 5173 jiwa, dengan rincian 2721 laki-laki dan 2452 perempuan. Penduduk

usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Bulangan Haji sekitar 2.112 atau hampir 42,3%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Secara geografis Desa Bulangan Haji terletak pada posisi -7.0640001 Lintang Selatan dan 113.511 Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 2000 m diatas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pamekasan tahun 2014, sepanjang tahun 2014 curah hujan di Desa Bulangan Haji rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 505,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2011-2016.

Secara administratif, Desa Bulangan Haji terletak di wilayah Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bulangan Timur. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Bulangan Branta Pegantenan. Di sisi selatan berbatasan dengan Desa Pamoroh Kecamatan Kadur, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Tlagah.¹

2. Pembagian Wilayah Desa Bulangan Haji

Wilayah Desa Bulangan Haji terdiri dari lima dusun yaitu Dusun Pogag, Dusun Durbagan, Dusun Dampol, Dusun Kolpoh, Dusun Sranrang, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis

¹ *Profil Desa Bulangan Haji* (Dokumen Pribadi), 1.

seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Bulangan Haji.

3. Keadaan Ekonomi Desa Bulangan Haji

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Bulangan Haji dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, msyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 2.600 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 300 orang, yang bekerja di sektor industri 125 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 2.125 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.794 orang. Berikut adalah tabel jumlah penduduk bersadarkan mata pencaharian.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani Jenis	1431 orang	1328 orang
2	Buruh Tani	34 orang	5 orang
3	Pegawai Negeri Sipil	1 orang	0 orang
4	Peternak	2 orang	1 orang
5	Tukang Kayu	11 orang	0 orang
6	Tukang Batu	6 orang	0 orang
7	Wiraswasta	121 orang	23 orang
8	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	51 orang	54 orang
9	Pelajar	153 orang	96 orang
10	Ibu Rumah Tangga	0 orang	515 orang
11	Purnawirawan/Pensiunan	4 orang	15 orang

12	Perangkat Desa	13 orang	0 orang
13	Buruh Harian Lepas	254 orang	132 orang
14	Sopir	2 orang	0 orang
15	Pemulung	2 orang	1 orang
16	Tukang Jahit	4 orang	6 orang
17	Tukang Sumur	3 orang	0 orang
18	Karyawan Honorer	46 orang	27 orang
19	Pemuka Agama	5 orang	4 orang
Jumlah		4350 orang	

Berdasarkan data diatas, maka angka pengangguran di Desa Bulangan Haji masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 tahun yang belum bekerja berjumlah 1500 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 1210 orang.²

4. Visi Misi Desa Bulangan Haji

a. Visi

Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Bulangan Haji, maka ditetapkan juga Visi Desa Bulangan sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera, Aman, dan Berkeadilan”

Visi tersebut merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Bulangan Haji. Adanya visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Bulangan Haji yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Selain itu, diharapkan juga akan terjadi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya

² *Profil Desa Bulangan Haji* (Dokumen Pribadi), 3.

pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

b. Misi

Hakekat misi Desa Bulangan Haji merupakan turunan dari visi Desa Bulangan Haji. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Misi Desa Bulangan Haji merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Bulangan Haji.

Misi Desa Bulangan Haji disusun sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan polatanam yang baik.
- 3) Menata Pemerintahan Desa Bulangan Haji yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
- 4) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
- 5) Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.

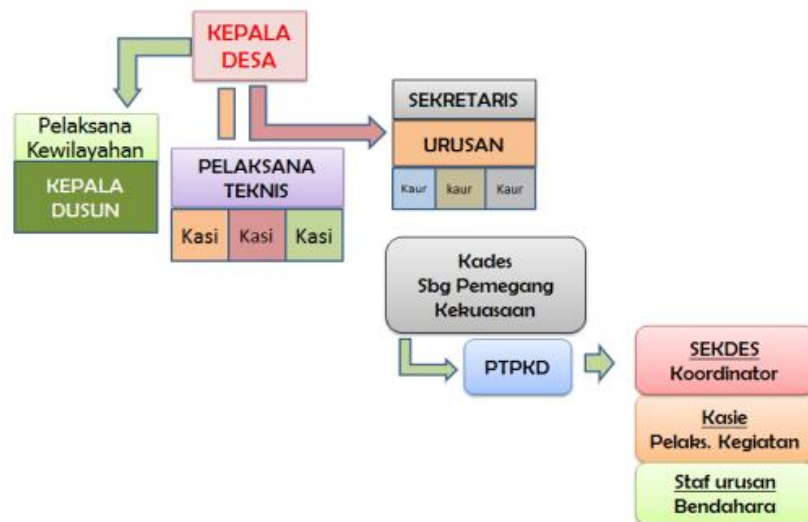
- 6) Menumbuh kembangkan Kelompok Tani dan Gbungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan pertanian.
- 7) Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.
- 8) Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam melestarikan lingkungan hidup.
- 9) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif, dan enterpreneur (wirausahawan).
- 10) Memberi motivasi usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.³

5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bulangan Haji

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Bulangan Haji tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut.

³ *Profil Desa Bulangan Haji* (Dokumen Pribadi), 8.

Gambar 4.2
Bagan Pemerintahan Desa

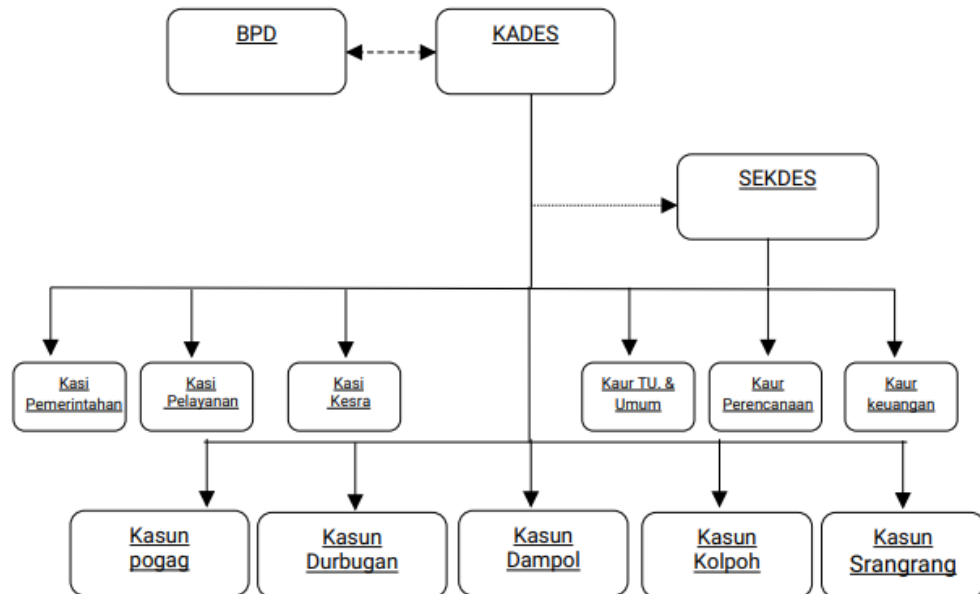


Keberadaan Dusun sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Bulangan Haji memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Bulangan Haji tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat melalui bagan berikut.⁴

⁴ *Profil Desa Bulangan Haji* (Dokumen Pribadi), 17.

Gambar 4.3

**Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Bulangan Haji**



Keterangan :

————— Garis komando

- - - - - Garis Koordinasi

Tabel 4.2

Nama Pejabat Pemerintah Desa Bulangan Haji

No	Nama	Jabatan
1	Akhmad Zaini	Kepala Desa
2	Milki Amirus Sholeh	Sekretaris Desa
3	Kusyairi	Kasi Pemerintahan
4	Moh. Hosni	Kasi Pelayanan
5	Ach. Tajuddin	Kasi Kesra

6	Bunadi	Kaur Perencanaa
7	Muhalli	Kaur Tata Usaha & Umum
8	Misbahul Munir	Kaur Keuangan
9	Abd. Kholiq	Kasun Pogag
10	Mohammad Halili	Kasun Durbugan
11	Hairul	Kasun Dampol
12	Nur Farid	Kasun Kolpoh
13	Moh. Ramli	Kasun Srangrang

6. Data Lapangan

a. Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Bulangan Haji

Dana desa merupakan sejumlah dana yang akan dikelola oleh pemerintah desa yang berasal dari beberapa sumber. Dana desa tersebut dialokasikan untuk kepentingan desa, pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Ada beberapa sumber dana desa yang disampaikan oleh Bapak Moh. Hosni sebagai operator Desa Bulangan Haji melalui wawancara langsung yaitu sebagai berikut :

“Sumber dana yang masuk ke rekening desa itu ada Dana Desa sendiri atau DD. DD itu berasal dari pusat sedangkan ADD dari daerah. Kalo yang dari desa sendiri namanya PAD terus ada lagi dari bagi hasil pajak dan retribusi pajak. Itu sama-sama daerah.”⁵

Sumber dana desa yaitu terdiri dari empat sumber. Dana Desa (DD) yang berasal dari desa berasal dari pemerintah pusat. Kemudian Anggaran Dana Desa (ADD) berasal dari pemerintah daerah. Sumber dana pokok keuangan desa yang ketiga merupakan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dalam hal ini berasal dari tanah parcaton atau tanah milik desa.

⁵ Moh. Hosni, Operator Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (7 Juni 2021).

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Moh. Hosni selaku Operator Desa Bulangan Haji, Bapak Akhmad Zaini sebagai Kepala Desa Bulangan Haji juga mengungkapkan sebagai berikut :

“Sumber dana itu ada empat yang pertama dari pemerintah pusat atau sering disebut DD kepanjangannya adalah Dana Desa itu dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa. Dana ini tidak boleh dialokasikan untuk operasional desa harus fokus sama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua itu berasal dari pemerintah daerah namanya ADD singkatan dari Anggaran Dana Desa yang alokasinya hanya untuk operasional desa. Dana ini boleh saja dipergunakan untuk pembangunan atau pemberdayaan desa namun tetap diprioritaskan untuk kepentingan operasional desa. Ketiga yaitu Pendapatan Asli Desa atau disingkat PAD yang bersal dari tanah milik desa. Kemudian yang terakhir ada bagi hasil dan retribusi pajak.”⁶

Dana desa tersebut dialokasikan untuk tujuan-tujuan tertentu. Dana desa dialokasikan untuk operasioal desa itu sendiri, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan seluruh kegiatan dan pengadaan yang diperuntukkan pada kepentingan desa. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Moh. Hosni sebagai Operator Desa Bulangan Haji tentang pengalokasian dana desa yaitu sebagai berikut :

“Setiap tahunnya ada dari daerah yang notabenenya memerintahkan dana ini untuk apa dan untuk apa. Itu memang ada pe-bidang. Di desa itu ada 5 bidang yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, pembinanaan, terus bidang pemberdayaan, dan bidang tidak terduga. Kalo DD itu hanya bisa digunakan untuk bidan pembangunan, pemberdayaan, dan bidang tidak terduga. Kalo pembinaan itu masih gak bisa. Kalau ADD hanya dipergunakan untuk pemerintahan, juga bisa ke pemberdayaan.”⁷

Diketahui pula jika dalam satu periode dana desa akan dicairkan dalam bebrapa tahap pencairan. Pencairan dan desa tersebut sangat tergantung pada pemberkasan yang diajukan oleh aparat desa. Anggaran Dana Desa (ADD)

⁶ Akhmad Zaini, Kepala Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (4 Juni 2021).

⁷ Moh. Hosni, Operator Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (7 Juni 2021).

periode pencairannya yaitu per-triwulan sama dengan Dana (DD). Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Bapak Moh. Hosni sebagai Operator Desa Bulangan Haji yaitu sebagai berikut :

“Kalau DD itu tergantung pemberkasan, biasanya bulan 4 sudah cair. Kalau berkasnya sudah lengkap dan tidak ada gangguan atau permasalahan dari atas, biasanya bulan 4 sudah dicairkan. Kalau DD bertahap, kalo ADD tiap triwulan. Yang DD itu biasanya dibagi 3. Tahap pertama 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20%. Kalo ADD setiap 3 bulan. Jadi semua itu tetap tergantung pemberkasan. Kalau pemberkasan dari sininya lambat, ya pencairannya juga otomatis lambat juga.”⁸

Dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa proses pencairan dana desa melalui beberapa tahapan. Dana Desa (DD) memiliki tiga tahap pencairan yaitu 40%, 40%, dan 20%. Kemudian untuk Anggaran Dana Desa (ADD) dicairkan dengan tahapan per-triwulan atau setiap tiga bulan. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat perbedaan pola pencairan dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Moh. Hosni sebagai berikut :

“Sebenarnya sama ya untuk pencairannya, hanya saja seperti ini pada tahap pertama tetap dicairkan 40%. Kemudian di tahap kedua kita itu dibagi menjadi 15% dulu, lalu 15% lagi, kemudian baru 10% jadi artinya di tahap kedua ini dibagi lagi menjadi 3 tahapan dari 40% seperti biasanya. Ini disebabkan karena ada pandemi covid jadi dialihkan ke BLT sebagai prioritas utama. Lalu, seperti biasa di tahap ketiga itu pencairannya sebesar 20%.”⁹

Akibat adanya pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020, maka pola pencairan dana Desa Bulangan Haji sedikit mengalami perubahan. Pada tahap pertama tetap dicairkan sebesar 40% dari keseluruhan. Kemudian pada tahap kedua juga tetap dicairkan sebesar 40% hanya saja pada tahap ini dibagi

⁸ Moh. Hosni, Operator Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (7 Juni 2021).

⁹ Moh. Hosni, Operator Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (7 Juni 2021).

lagi pola pencairannya menjadi 15% di awal, kemudian 15%, lalu terakhir sebesar 10%. Pada tahap ketiga juga tetap sicairkan sebesar 20% dari keseluruhan total anggaran.

b. Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Menyusun Anggaran dan Pendapatan Desa Bulangan Haji

Desa Bulangan Haji dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya dilakukan dengan memenuhi kriteria terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel. Pembukuan dan penatausahaan di Desa Bulangan Haji sudah sesuai dengan peraturan dan lengkap. Hal tersebut merupakan syarat untuk dapat mengajukan anggaran. Tanpa adanya pembukuan, Desa Bulangan Haji tidak akan dapat mengajukan anggaran baik kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Moh. Hosni sebagai operator Desa Bulangan Haji sebagai berikut:

“Untuk transparansi seperti banner yang memuat tentang dana desa untuk transparansi, disini udah ada. Implikasinya sudah ada. Secara media juga sudah ada, bisa diakses. Indikator secara pembukuan dan penatausahaan juga sudah ada lengkap. Karena tanpa adanya pembukuan itu kita tidak bisa mengajukan anggaran. Misalnya, DD ditahap pertama kita pemberkasannya tidak lengkap, maka kita tidak bisa mengajukan di tahap keduanya. ADD juga sama seperti itu. Ketika tri-wulan satu sudah selesai, maka pemberkasan juga sudah harus selesai. Jadi, itu menjadi syarat untuk pengajuan anggaran berikutnya.”¹⁰

¹⁰ Moh. Hosni, Operator Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (7 Juni 2021).

Gambar 4.5

Transparansi LPJ APBDesa Tahun 2020



Sejalan dengan yang disampaikan oleh operator desa, Bapak Akhmad Zaini sebagai kepala desa juga mengatakan hal yang sama yaitu sebagai berikut :

“Untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban di Desa Bulangan Haji ini sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan dari pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam menggunakan dana desa yang sudah ada anggarannya itu kita juga harus sesuai dengan kebijakan yang turun dari pemerintah pusat maupun daerah itu. Kita tidak bisa seenaknya tanpa ikutin mereka.”¹¹

¹¹ Akhmad Zaini, Kepala Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (4 Juni 2021).

Dari data tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dana desa di Desa Bulangan Haji sudah sesuai dengan kriteria akuntabilitas hukum. Adapun dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan di Desa Bulangan Haji yaitu dengan rapat dusun kemudian akan dilanjutkan dengan rapat desa untuk menyusun RKPDes yang menjadi tolak ukur pembangunan desa selama satu tahun ke depan. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Bulangan Haji yaitu Bapak Milki Amirus Sholeh sebagai berikut :

“Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan di Desa Bulangan Haji ini, ada beberapa prosesnya. Dimulai yang pertama dari rapat dusun. Rapat dusun ini dihadiri oleh kepala desa, BPD, dan aparat desa lainnya. Kemudian kalau sudah selesai, maka akan diadakan rapat desa. Ini bentuknya kaya musyawarah desa yang bertujuan untuk menyusun yang namanya RKPDes yang nanti menjadi tolak ukur untuk pembangunan desa ini satu tahun ke depan.”¹²

Selanjutnya anggaran dana desa kemudian diwujudkan sebagai program pembangunan dan pemberdayaan di Desa Bulangan Haji. Dana desa yang dianggarkan lebih kepada pembangunan Desa Bulangan Haji. Pembangunan Infrastruktur lebih diprioritas di Desa Bulangan Haji. Tujuannya adalah untuk membangun Desa Bulangan Haji yang lebih baik. Sesuai dengan penuturan Bapak Akhmad Zaini sebagai kepala desa yaitu sebagai berikut :

“Untuk lima tahun terakhir sebelum corona itu ya lebih banyak dikeluarkan untuk pembangunan fisik infrastruktur, termasuk jalan, pembangunan PAUD, pembangunan lapangan futsal, seperti itu. Bahkan untuk pembangunan BUMDes juga. Paling banyak sih selama saya menjadi kepala desa itu pembuatan paving itu ya di jalan-jalan banyak disini. Itu juga masih ada lagi yang belum terealisasi karna sudah sempat direncanakan tapi ternyata kena pandemi. Tapi tetap akan direncanakan pembangunannya.”¹³

¹² Milki Amirus Sholeh, Sekretaris Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (7 Juni 2021).

¹³ Akhmad Zaini, Kepala Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (4 Juni 2021).

Kegiatan fisik berupa pembangunan di Desa Bulangan Haji memang menjadi prioritas. Namun ketika terjadi pandemi covid-19 yang tidak terduga, maka rencana pembangunan desa yang sudah ada didalam anggaran dana desa mengalami perubahan. Bentuk kegiatan fisik dikurangi, karena anggaran dipangkas untuk penanganan pandemi covid-19. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Moh. Hosni sebagai operator desa yaitu sebagai berikut :

“Ya di tahun 2020 ini untuk kegiatan fisik, pembangunan fisik, ya itu sudah menurun. Karna kan anjuran dari atas sudah ada penanganan covid, dan tentunya untuk pencegahan-pencegahan covid. Jadi anggarannya masuk kesana. Memang tetap anggaran yang misalnya Rp 1 Milyar tetap tapi berapa persen harus kesana. Misalnya untuk tahun ini kan 8% harus ke penanganan covid-19. Itu memang perintah dari pusat.”¹⁴

Mengenai realisasi anggaran dana desa, Desa Bulangan Haji tetap mengikuti perintah dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Apabila ada perubahan, maka desa juga harus bergerak sesuai dengan yang diperintahkan. Bapak Akhmad Zaini sebagai kepala desa mengungkapkan yaitu :

“Kita disini itu bergerak sesuai kebijakan dan perintah dari atas, artinya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalo katanya begini, ya kita juga harus begini. Kita tidak boleh membuat aturan sendiri seperti yang kita mau. Jadi dana yang semula untuk pembuatan paving misalkan, harus diprioritaskan dulu untuk penanganan covid-19 karena ini kan masalah mendesak dan tidak terduga. Jadi, ada perubahan. Itu juga disampaikan nanti di laporan pertanggungjawabannya.”¹⁵

Tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dalam tahap perencanaan ini, akan dibahas mengenai anggaran dan belanja keuangan desa. Oleh karena itu, dalam tahap perencanaan dilakukan Musyawarah Desa

¹⁴ Moh. Hosni, Operator Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (7 Juni 2021).

¹⁵ Akhmad Zaini, Kepala Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (4 Juni 2021).

(MUSDES). MUSDES merupakan suatu forum dimana pada forum tersebut kan dibahas mengenai usulan perencanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat Desa Bulangan Haji. Bapak Milki Amirus Sholeh sebagai sekretaris Desa Bulangan Haji menuturkan sebagai berikut :

“Untuk perencanaan pembangunan desa itu nanti kami adakan musyawarah dusun (MUSDus). Nanti yang hadir pada musyawarah tersebut jelas kepala desa ya, anggota BPD dan juga tokoh masyarakat yang merupakan perwakilan dari warga di dusun tersebut. Kemudian setelah rapat dusun selesai dan rampung, kami sudah mengetahui apa yang menjadi masukan dari masyarakat. Kemudian setelah itu, kami mengadakan rapat atau musyawarah desa guna membentuk RKPDes atau Rencana Kerja Desa.”¹⁶

Sebelum melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa yang baru saja dilantik, seorang kepala desa dan aparat desa yang baru akan melaksanakan rapat desa dalam rangka penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Rapat desa tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, BPD, dan perwakilan dari masyarakat sebagai partisipan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Moh. Hosni yaitu sebagai berikut :

“Di desa itu kan seperti ini, setelah pilkades terlaksana kalau sudah ada yang ditentukan sebagai pemenang itu wajib mempersiapkan RPJMDes selama periode jabatannya. Untuk rancangan apa aja akan dikerjakan. Terus setiap tahunnya ada yang namanya RKP atau rencana kerja dalam satu tahun. Dalam perencanaan itu harus kita musyawarahkan. Dimana akan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan organisasi yang ada disini di pemerintah desa termasuk BPD dan terkhusus kepala desa.”¹⁷

Rapat dan musyawarah desa tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membahas masalah dan menampung aspirasi dari masyarakat terkait pembangunan dan pemberdayaan yang dibutuhkan di Desa Bulangan Haji. Namun dalam kegiatannya, seluruh aspirasi masyarakat tersebut tidak akan

¹⁶ Milki Amirus Sholeh, Sekretaris Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (7 Juni 2021).

¹⁷ Moh. Hosni, Operator Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (7 Juni 2021).

semuanya dapat terpenuhi. Akan diutamakan hal-hal yang menjadi kepentingan untuk diprioritaskan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Moh. Hosni sebagai operator desa yaitu sebagai berikut :

“Dalam MUSDes itu nantinya memiliki beberapa usulan pembangunan yang harus diselesaikan. Akan tetapi kemampuan anggaran kita kan terbatas, maka dari itu perlu kita duduk bersama lagi dengan RT, RW, termasuk lembaga-lembaga mandiri masyarakat, lembaga adat, dan juga perkumpulan-perkumpulan yang ada. Agar nantinya desa ini tau persis apa yang masyarakat lebih butuhkan, dan pembangunan yang seperti apa yang diharapkan.”¹⁸

Selain hal tersebut, adapun hal-hal yang tidak terduga yang dapat berpengaruh pada realisasi anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 menjadi pandemi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan pemerintahan, terutama pada bidang ekonomi. Hal ini juga menyebabkan adanya perubahan anggaran untuk dialokasikan pada bidang penanggulangan bencana darurat yang sebelumnya tidak ada dalam perencanaan. Sesuai dengan yang dituturkan oleh Bapak Akhmad Zaini sebagai kepala desa yaitu sebagai berikut :

“Makanya ketika ada dalam satu tahun misalnya ada kegiatan infrastruktur berjalan, masyarakat sudah tau. Secara musyawarah sudah tau, terus publikasinya sudah ada juga. Terus ketika ada perubahan masyarakat juga harus diajak musyawarah. Makanya ketika ditentukan titik mana aja kegiatan infrastruktur dipertengahan jalan atau dipertengahan tahun ada perubahan dari pusat, seperti covid kemaren itu ada perubahan karena termasuk bencana internasional ya maka langsung ada perubahan. Pas waktu ada perubahan itu kita harus musyawarah, karna misalkan awalnya dianggarkan untuk kegiatan fisiknya maka harus diubah ke penanggulangan bencana mendesak atau darurat yaitu penanganan covid itu. Makanya sudah ada perubahan kan.”¹⁹

¹⁸ Moh. Hosni, Operator Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (7 Juni 2021).

¹⁹ Akhmad Zaini, Kepala Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (4 Juni 2021).

Kemudian setelah MUSDus telah dilaksanakan, kemudian dari itu akan dilaksanakan MUSREMBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Pada MUSREMBANGDES inilah akan ditentukan prioritas dari semua usulan mengenai pembangunan desa. Kemudian hasil dari MUSREMBANGDES tersebut akan menjadi RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa. Bapak Akhmad Zaini sebagai kepala desa menuturkan sebagai berikut :

“Kalo Undang-Undang Desa No. 06 Tahun 2014 itu sudah jelas terkait penggunaan dana desa. Ada juga Permendagri kemudian Perda lalu Pergub yang mengatur prioritas penggunaan dana desa, dasar dari terkait realisasi terkait tahapan kegiatan yang menggunakan ADD dan DD dalam hal ini tentunya melalui proses tahapan. Tahapan pertama ya itu tadi, diadakan MUSDus untuk menampung usulan-usulan masyarakat, kemudian dari usulan tersebut dilihat mana yang lebih diprioritaskan sebagai kebutuhan warga masyarakat. Lalu setelah semua selesai maka diadakan MUSDes atau MUSREMBANGDES atau rapat desa namanya. Dimana dalam MUSREMBANGDES ini nantinya akan dihasilkan RKPDes untuk patokan penggunaan keuangan desa.”²⁰

Pelaksanaan pembangunan di Desa Bulangan Haji selain juga mempertimbangkan kekuatan anggaran yang dimiliki juga mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Demi mewujudkan keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat mengenai dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan, maka dilaksanakan kegiatan fisik wajib untuk menyertai dengan papan informasi yang didalamnya memuat nama kegiatan, tanggal kegiatan, dan juga besarnya

²⁰ Akhmad Zaini, Kepala Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (4 Juni 2021).

dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Akhmad Zaini sebagai kepala desa yaitu :

“Kalau dalam hal transparansi kepada masyarakat disini sudah ada ini. Seperti banner atau baliho yang disana sudah ada nama kegiatannya apa, dilakukan tanggal berapa, menghabiskan berapa dananya semua jelas ada disini sama foto kegiatannya juga ada. Ini bentuk pertanggungjawaban realisasi anggaran dana desa selama satu tahun. Dibuatkan seperti ini agar masyarakat bisa dengan mudah mengetahui dan melihat tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Ini kan ditempatkan di tempat yang strategis, artinya tidak tersembunyi supaya masyarakat mudah untuk melihatnya.”²¹

Pada setiap pelaksanaan pembangunan kegiatan fisik akan dipasang papan kegiatan dan setelah selesai papan kegiatan akan dicabut untuk diganti prasasti agar masyarakat juga mengetahui mengenai anggaran pembangunan untuk kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Desa Bulangan Haji juga diikutsertakan dalam proses pembangunan. Desa Bulangan Haji tidak mengundang pekerja dari luar. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Akhmad Zaini sebagai kepala desa yaitu sebagai berikut :

“Setiap pembangunan itu pastinya ada partisipasi masyarakat. Bukan tidak dibayar. Mereka itu sebagai pekerja, ya dibayar pastinya. Kita tidak mengundang pekerja dari luar. Misalnya, ingin dibuat jalan paving di dusun ini, jadi nanti kita carikan orang-orang sana untuk pekerjanya. Jadi kan masyarakat itu merasa dia bekerja untuk daerahnya sendiri. Selain membuka lapangan kerja, pembangunan desa juga bisa lebih efektif kan kalau dikerjakan warganya sendiri. Nanti kalau pembangunannya besar, kita terakhir kasih prasasti sebagai tanda telah dilaksanakan pembangunan fisik disitu.”²²

Dalam merealisasikan anggaran dana desa di Desa Bulangan Haji, selama ini tidak ada kendala yang berarti. Hanya saja terkadang terdapat hal-hal yang tidak terduga yang menjadi penghambat dari proses pembangunan yang sedang dilaksanakan tersebut. Pada tahun 2020 pembangunan di Desa

²¹ Akhmad Zaini, Kepala Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (4 Juni 2021).

²² Akhmad Zaini, Kepala Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (4 Juni 2021).

Bulangan Haji terhambat oleh adanya pandemi covid-19. Bapak Akhmad Zaini sebagai kepala desa menuturkan sebagai berikut :

“Kendalanya itu sebenarnya hampir tidak ada selama saya menjabat. Namun sekakarang kendalanya datang dari pandemi ini. Jadi mau gak mau anggaran yang sudah direncanakan untuk pembangunan itu harus dialihkan kepada penanganan covid-19. Itu sudah perintah langsung dari pemerintah pusat. Jadi kita harus menghentikan pembangunan jalan waktu itu. Ini kadang yang buat masyarakat mengeluh. Mereka kan kurang mengerti bagaimana mekanisme adanya perubahan anggaran di desa ini. Tapi ya, karna memang perintah kita mencoba untuk memberikan pemahaman lewat tokoh masyarakat contohnya, supaya mereka bisa mengerti dana desa itu dibuat apa.”²³

Pandemi covid-19 yang melanda dunia sangat berpengaruh pada realisasi anggaran seluruh daerah terutama di Desa Bulangan Haji. Anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan desa kemudian harus beralih pada penanganan covid-19, seperti contohnya yaitu BLT (Bantuan Langsung Tunai). Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi covid-19, baik dari segi kesehatan maupun ekonominya. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Moh. Hosni sebagai operator desa yaitu sebagai berikut :

“Pada tahun 2020 itu memang harus terjadi perubahan karena adanya pandemi covid-19. Anggaran yang awalnya untuk pembangunan desa harus dipotong untuk penanganan covid-19. Anggaran itu lebih banyak masuk ke BLT. Masyarakat kan banyak yang terdampak ekonominya karna pandemi. Jadi, BLT itu diperuntukkan untuk masyarakat yang terdampak covid. Makanya pembangunan seperti pembuatan jalan itu harus dihentikan terlebih dahulu. Sekarang prioritas dana desa itu digunakan untuk penanganan pandemi covid-19.”²⁴

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dengan aparat desa di Desa Bulangan Haji telah melakukan tugasnya dengan cukup baik. Meskipun tidak dapat dipungkirbahwa terdapat beberapa pembangunan

²³ Akhmad Zaini, Kepala Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (4 Juni 2021).

²⁴ Moh. Hosni, Operator Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (7 Juni 2021).

yang belum terealisasi akibat adanya pandemi yang tidak pernah diduga. Namun pemerintah Desa Bualangan Haji sudah melakukan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan realisasi anggaran dana desa.

Tahapan terakhir mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu tahap penyusunan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut wajib dilakukan secara transparan untuk dapat diketahui semua kalangan. Setiap kegiatan perlu untuk dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut diperuntukkan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh warga Desa Bulangan Haji. Bapak Moh. Hosni mengemukakan sebagai berikut :

“Setelah semua kegiatan selesai, barulah kita membuat laporan untuk realisasi dana desa itu setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah pusat dan daerah dan seluruh masyarakat di desa ini. pertanggungjawaban tersebut kemudian dicetak agar masyarakat desa bisa dengan mudah mengakses informasi yang berkaitan dengan realisasi anggaran dana desa. Disini ada sudah lengkap pastinya. Namun untuk pelaporannya menggunakan sistem komputer.”²⁵

Penyusunan pelaporan dana desa dilakukan menggunakan sistem komputerisasi. Dimana Desa Bulangan Haji sudah menggunakan SISKEUDES sejak tahun 2018. SISKEUDES merupakan aplikasi yang dimiliki oleh desa untuk melaporkan segala bentuk keuangan desa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Moh. Hosni sebagai operator desa yaitu sebagai berikut :

“Iya di desa ini sudah pakai SISKEUDES sejak tahun 2018. Semuanya ada disana, pelaporan keuangan dan penatausahaan ada disana semua. Mulai dari perencanaan sampai realisasinya ada disana semua. Pembukuan juga lengkap disana. Nah dari perencanaan sama pembukuan ini yang nantinya jadi SPJ (Surat Pertanggung Jawaban). Jadi semuanya sudah pakai sistem, gak ribet sebenarnya.”²⁶

²⁵ Moh. Hosni, Operator Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (7 Juni 2021).

²⁶ Moh. Hosni, Operator Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (7 Juni 2021).

Bapak Moh. Hosni juga menambahkan terkait penjelasan tentang SISKEUDES yaitu sebagai berikut :

“SISKEUDES itu adalah aplikasi untuk melaporkan segala bentuk yang berhubungan dengan keuangan desa. Dan pada saat pelaporan, semuanya harus sesuai dengan slip bank dan juga nota-nota yang sudah diberikan oleh desa. Karna saya tidak ikut campur masalah pengeluaran dananya. Saya hanya mencatat di SISKEUDES apa-apa yang sudah terealisasi. Sedangkan untuk masalah transparansi kepada masyarakat itu sudah ada banner atau pamflet tentang keuangan desa dalam satu periode, dn jika ada perubahan maka banner atau pamflet itu akan diubah.”

Menurut Bapak Moh. Hosni sebagai operator yang menangani pelaporan keuangan Desa Bulangan Haji, aplikasi SISKEUDES sangat membantu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan atas keuangan desa. Aplikasi ini dapat membuat kegiatan dalam hal pertanggungjawaban lebih efektif dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Seperti yang disampaikan yaitu sebagi berikut :

“Aplikasi SISKEUDES ini cukup membantu dalam hal memberikan laporan dan membantu untuk kita merumuskan sebuah kegiatan itu bisa lebih cepat. Kemudian bisa diakses juga seluruh elemen yang berkepentingan baik dari Kemendes maupun lembaga lainnya. Jadi bisa langsung melihat kegiatan yang berjalan dalam satu tahun itu sudah dikerjakan atau belum itu bisa dilihat dari perkembangan updating dalam SISKEUDESnya.”²⁷

Namun dalam hal pengoperasian SISKEUDES di Desa Bulangan Haji, terdapat sebuah kendala yang dialami. Kendala tersebut merupakan kendala teknis yaitu tidak dapatnya SISKEUDES diakses langsung dari daerah Balai Desa Bulangan Haji, karena di daerah tersebut sangat sulit untuk mendapatkan signal. Sementara dalam pengoperasiannya, SISKEUDES harus menggunakan

²⁷ Moh. Hosni, Operator Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (7 Juni 2021).

koneksi internet. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Moh. Hosni sebagai operator desa yaitu sebagai berikut :

“Saya ini bukan bekerja disini. Kalau mau mengakses SISKEUDES daya harus ke kota dulu biar bisa dikerjakan. Makanya, untuk hari-hari kerja saya jarang berada disini. Disini belum terdapat koneksi internet yang bagus. Makanya, belum bisa dipasangkan wifi seperti desa-desa lainnya. Hanya itu sih kendala dalam pengoperasian SISKEUDES ini. Jadi data-data itu gak ada disini. Selalu saya bawa dengan perangkatnya. Tapi, itu bukan kendala yang berarti. Karena memang masih bisa diusahakan untuk dikerjakan, tapi ya gak disini.”²⁸

Hal yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap dana desa hampir tidak ada. Hanya saja di Desa Bulangan Haji masih cukup sulit untuk mengakses internet. Koneksi internet yang tidak terlalu sampai di Desa Bulangan Haji menjadi salah satu penyebab operator desa dalam mengerjakan pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi SISKEUDES harus di tempat lain.

Dana desa yang telah dianggarkan untuk alokasi pembiayaan program-program dan kegiatan-kegiatan masyarakat di Desa Bulangan Haji ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menggunakan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dana desa ini nantinya akan membantu masyarakat mewujudkan suatu desa yang maju, sejahtera dan mandiri. Dampak akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bulangan Haji yang dirasakan oleh masyarakat desa sendiri dapat diketahui melalui penuturan dari Ibu Iis sebagai warga Desa Bulangan Haji yang berprofesi sebagai pedagang yaitu sebagai berikut :

“Kalau pembangunan disini sudah bagus. Banyak jalan-jalan di desa ini yang diperbaiki. Karena kan disini itu masih pelosok, jadi banyak jalan yang masih tanah, jadi kalau musim hujan becek. Tapi sama Pak

²⁸ Moh. Hosni, Operator Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (7 Juni 2021).

Zaini itu gak dibiarkan. Jalannya diperbaiki jadi paving, ini jalan yang didepan ini baru dibuat ini programnya desa juga. Kalau covid ini, perbaikan jalan sudah berkurang. Karena banyak bantuan-bantuan yang turun dari desa kan. Jadi, warga juga lebih senang dapat bantuan kalau sekarang. Jadi senang sama kepala desanya. Karena orang-orang yang gak punya disini dapat bantuan semua. Kalo Pak Zaini itu jadi kepala desa dua tahun, gak pernah pilih-pilih. Dia pasti kasih sama orang-orang yang membutuhkan.”²⁹

Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Ibu Nur sebagai warga

Desa Bulangan Haji yang berprofesi sebagai guru TK yaitu sebagai berikut :

“Kepala Desa Bulangan Haji ini mbak udah menjabat dua periode, berarti beliau sudah dipercaya ya sama masyarakat. saya rasa juga demikian. Kalau dilihat dari kemajuan desanya, diantara Desa Bulangan yang lain, Desa Bulangan Haji ini yang terkenal lebih maju. Bantuan disini merata mbak, pelayanan di balainya juga selalu pas di jam-jamnya. Setiap harinya itu perangkat desa pasti ada disana. Nah kalau untuk pembangunan, disini itu konsentrasinya ke jalan mbak. Cuma, didaerah saya ini masih ada jalan yang layak diperbaiki tapi belum diperbaiki. Mungkin ada daerah lain yang lebih prioritas. Karena sebenarnya disini juga jarang dilintasi masyarakat umum. Tahun kemarin juga desa sudah membangun lapangan futsal itu disana bagus mbak. Tapi karena covid ini, katanya pembangunannya belum bisa dilanjutkan karena dananya masih dipakai untuk penanganan covid. Setau saya, kalau untuk masalah keuangan selama ini belum pernah ada masalah besar yang sampai kedengaran warga. Tapi ya biasa kadang komentar orang-orang terutama yang gak dapat bantuan itu bilang dana desa dibuat untuk bantuan semua untuk pembangunan desanya mana, kaya gitu sih mbak.”³⁰

Selain itu, menurut Bapak Budi sebagai Pamong Dusun Pogak juga menyampaikan pandangannya terhadap kinerja aparat Desa Bulangan Haji yaitu sebagai berikut :

“Kalau disini, untuk transparansinya benar-benar bisa dipercaya. Karena setiap tahun pasti dikerluarkan laporan realisasi anggaran sama semua dokumentasinya. Bahkan tidak hanya satu banner kadang. Disini didepan ada, disana yang besar juga ada. Tapi kan kalau untuk keuangan secara rincinya, pasti perangkat desa yang tahu. Itu pun yang punya wewenang, kita hanya menjalankan tugas sebagaimana yang seharusnya. Pembangunan disini juga masih terus berjalan. Makanya

²⁹ Iis, Warga Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (24 September 2021).

³⁰ Nur, Warga Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (24 September 2021).

Bulangan Haji ini terkenal lebih maju daripada yang lain. Cuma yang disayangkan selama ini pembangunan masih terus diperuntukkan untuk jalan saja, pastinya menurut saya itu ada fasilitas lain yang gak kalah penting. Tapi yasudahlah mungkin kepala desa lebih tau.”³¹

Dari ketiga pendapat warga yang telah disampaikan, sejauh ini warga masyarakat Desa Bulangan Haji percaya dengan kinerja perangkat desanya. Terutama dalam hal realisasi anggaran pada bidang pembangunan, karena hal tersebut yang dampaknya pasti langsung dirasakan oleh warga masyarakat. Desa Bulangan Haji selalu menjalin kerjasama yang baik antar perangkat desa dan warga masyarakat.

Namun, yang disayangkan sampai saat ini pembangunan di Desa Bulangan Haji masih hanya berkonsentrasi pada fasilitas-fasilitas umum yang terlihat saja seperti contohnya yang paling banyak yaitu pembangunan jalan. Tentunya selain perbaikan jalan warga Desa Bulangan mengharapkan ada kemajuan-kemajuan di bidang lain, contohnya di bidang ekonomi. Namun saat ini desa belum bergerak disana.

B. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkan sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan antara lain sebagai berikut:

1. Desa Bulangan Haji memiliki 4 sumber pokok keuangan desa yaitu Dana Desa (DD) yang berasal dari pemerintah pusat, Anggaran Dana Desa (ADD) yang

³¹ Budi, Warga Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (24 September 2021).

berasal dari pemerintah daerah, Pendapatan Asli Desa yang berasal dari tanah milik desa, dan Bagi Hasil dan Retribusi Pajak.

2. Dana Desa (DD) diprioritaskan untuk pembangunan, pemberdayaan, dan hal-hal yang tidak terduga, sedangkan Anggaran Dana Desa diprioritaskan untuk pemerintahan / operasional desa namun bisa juga untuk pemberdayaan.
3. Terdapat tiga tahapan dalam akuntabilitas dana desa yaitu tahap pertama merupakan tahap perencanaan, tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, dan yang ketiga merupakan tahap pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat Desa Bulangan Haji melalui MUSDUS, MUSDES, dan MUSREMBANGDES. Sama halnya pada tahap pelaksanaan dilakukan secara terbuka kepada masyarakat. Artinya, masyarakat dapat mengetahui dan ikut serta mengawasi pelaksanaan pembangunan di Desa Bulangan Haji. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah Desa Bulangan Haji sudah menerapkan akuntabilitas pertanggungjawaban laporan keuangan dengan baik. Pemerintah Desa Bulangan Haji sudah menyediakan laporan keuangan yang baik dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat Desa Bulangan Haji.
4. Pada saat pelaksanaan pembangunan di Desa Bulangan Haji ada hal yang tidak terduga terjadi, namun kegiatan pembangunan belum terselesaikan atau belum terealisasi maka kegiatan pembangunan fisik tersebut harus ditangguhkan dan mengalami perubahan. Pemerintah desa akan kembali duduk bersama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait di Desa Bulangan Haji untuk

membicarakan kembali perubahan yang harus terjadi karena adanya perintah dari pemerintah pusat maupun daerah.

5. Pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang mengharuskan pembangunan fisik berupa pembuatan jalan paving di salah satu dusun di Desa Bulangan Haji harus dihentikan sementara. Anggaran dana desa yang semula sudah direncanakan untuk pembangunan fisik, kemudian dialihkan kepada anggaran untuk penanganan covid-19. Anggaran dana desa tersebut banyak dipotong atau dialihkan kepada BLT (Bantuan Tunai Langsung) yang diberikan kepada keluarga yang terdampak pandemi covid-19.
6. SISKEUDES merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat pembukuan dalam penelolaan keuangan desa dan mencatat berbagai kepentingan penatausahaan Desa Bulangan Haji. Namun, karena kurangnya koneksi internet di Desa Bulangan Haji, maka pengerjaan SISKEUDES tersebut dilakukan di tempat lain yang lebih efisien.

C. Pembahasan

1. Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Bulangan Haji

Manajemen pembangunan desa bertujuan untuk mengatur tatanan dan eksplorasi desa dalam melakukan dan mengimplementasikan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Mengatur pembangunan pedesaan secara baik, maka harus berdasarkan pada konsep komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi.

Manajemen pembangunan desa harus dikomunikasikan berdasarkan aspek kepentingan dan kebutuhan bagi masyarakat.³²

Pasal 63 PP No. 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangan. “Partisipatif” dalam ketentuan ini dimaksudkan kepada melibatkan pihak terkait penyusunan pembangunan desa.³³

Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan mekanisme penganggaran tingkat desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. Rancangan pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama-sama. Kemudian sesuai dengan hasil musyawarah tersebut, maka kepala desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.³⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Bulangan Haji, dapat diketahui bahwa proses pengelolaan dana desa dalam tahap perencanaan sudah cukup baik. Masyarakat benar-benar dilibatkan dalam proses perencanaan penggunaan dana desa melalui MUSDUS sebagai tingkat paling awal kemudian dilanjut dengan MUSREMBANGDES untuk merumuskan RKPDes sebagai pedoman kegiatan Desa Bulangan Haji dalam satu tahun ke depan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional, merupakan prasyarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan

³² Hayat, dkk, Manajemen Ekonomi Desa, (Malang : Inteligensi Medis, 2018), 47.

³³ Sadu Wasistiono, Irwan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, (Bandung : Fokusmedia, 2007), 132.

³⁴ Supriadi, Edi, “Pertanggung Jawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal IUS* 3, No. 8 (Agustus 2015) : 339.

Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan desa. Oleh karena itu partisipasi dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri.³⁵

Partisipasi masyarakat Desa Bulangan Haji menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka cenderung semakin tinggi pula efektivitas dalam pengelolaan dana di Desa Bulangan Haji. Berdasarkan data lapangan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa partisipasi masyarakat Desa Bulangan Haji sangat tinggi terutama pada tahap perencanaan. Hal ini yang membuat tujuan bersama itu dapat dicapai.

Pemerintah Republik Indonesia beberapa tahun terakhir berfokus pada menstimulasi pembangunan dari komponen pemerintahan terkecil yaitu pemerintahan desa. Demi mencapai tujuan pemerintah tersebut, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang tidak sedikit jumlahnya dalam komposisi anggaran nasional atau APBN pada setiap tahun.³⁶ Pengalokasian dana tersebut ditujukan untuk pembangunan desa agar semakin membaik.

Dalam pengalokasian dana desa yang terdiri dari empat sumber dana desa yaitu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendapatan dari tanah milik desa, serta bagi hasil dan retribusi pajak telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan

³⁵ Koyoga, Teraik, dkk, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya Papua," *Jurnal Berkah Imuyah Efisien* 3, No. 2 : 3.

³⁶ Syacbrani, Warkana, dan Muhammad Yahya, "Realisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Bongayah," *Journal for Research in Management* 1, No. 2 (2018) : 45.

kebutuhan Desa Bulangan Haji. Dana tersebut dialokasikan dalam beberapa bidang yaitu bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, dan hal-hal tidak terduga. Namun sepanjang tahun 2020 dana desa tersebut dialokasikan pada bidang penanggulangan bencana darurat akibat terjadinya pandemi covid-19. Terjadi perubahan dalam realisasi anggaran dana desa untuk dialokasikan terhadap penanganan terhadap masyarakat terdampak covid-19.

2. Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Bulangan Haji Menyusun Anggaran dan Pendapatan Desa

Pelaksanaan otonomi tingkat pemerintah terendah yaitu desa dapat dikatakan sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan adanya sumber-sumber kekuatan dan ketahanan bagi pemerintah nasional. Selain hal tersebut, desa juga diibaratkan sebagai kekuatan rantai besi yang saling berkaitan dalam mewujudkan cita-cita bersama antara pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat.³⁷

Hal yang terpenting dalam tahap pembangunan di Desa Bulangan Haji adalah sebuah transparansi. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

³⁷ Dedy Williams, "Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur," 53.

³⁸ Danang Kurnia, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2015), 35.

Transparansi atau keterbukaan memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat. Hal tersebut terutama untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses pelaksanaan maupun pertanggungjawabannya.³⁹

Pada pelaksanaan pembangunan di Desa Bulangan Haji, dalam hal transparansi mengenai keuangan desa dinilai cukup baik. Dimana masyarakat desa dapat mengakses informasi yang disediakan dalam bentuk baliho atau banner yang disediakan di sekitar balai desa yang memuat mengenai laporan APBDes dan realisasi keuangan desa. Selain itu, masyarakat juga bisa melihat bukti papan informasi maupun prasasti pada pembangunan fisik yang telah selesai dilakukan.

Hal tersebut juga merupakan cerminan dari pengelolaan yang akuntabel. Dimana hal tersebut sebagai perwujudan kewajiban pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan di Desa Bulangan Haji. Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerinth desa dapat dipertanggung jawabkan dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang melandasinya.

Dalam pembangunan fisik yang dilakukan masyarakat juga diberikan kesempatan penuh untuk berpartisipasi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Desa Bulangan Haji memperkerjakan masyarakat sekitar untuk menangani pembangunan tersebut. Pembangunan yang paling banyak dilakukan di beberapa dusun di Desa Bulangan Haji adalah pembangunan jalan dalam bentuk paving.

³⁹ Haeni Wela dan Agus Suprojo, "Efektivitas Kinerja Kepala Desa Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Desa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 5, No. 3 (2019) : 82.

Dengan terlibatnya masyarakat didalam perencanaan serta pembangunannya, hal tersebut akan menambah kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Pada tahun 2020 akibat terjadinya pandemi covid-19 yang tidak pernah terduga dan diprediksi, maka beberapa pembangunan di Desa Bulangan Haji tidak dapat terealisasi atau bahkan terhenti pembangunannya. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan dari pemerintah pusat dimana anggaran dana desa harus dialokasikan untuk penanganan covid-19. Perubahan tersebut tentunya kembali dimusyawarahkan kepada seluruh elemen pemerintahan desa dan masyarakat setempat untuk bisa mengerti dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Perubahan tersebut juga tentunya disampaikan secara rinci dalam informasi berupa laporan pertanggungjawaban yang disajikan untuk masyarakat.

Peran besar yang diterima oleh pemerintah desa, tentunya akan disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya. Semuakegiatan baik berupa pembangunan atau pemberdayaan akan dimintai pertanggungjawabannya kepada pemerintah pusat dan seluruh masyarakat desa bersangkutan. Di akhir kegiatan, laporan pertanggungjawaban tersebut akan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁰

Salah satu aspek penting yang mampu mewujudkan *Good Governance* dan paling sering menjadi pembahasan publik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan

⁴⁰ Gimon, Hadi Prabowo, Jantne J. Tinangon dan Dhullo Affandi, "Analisis Sistem Akuntabilitas Pelaksanaan APBDes pada Pemerintah Desa Kopandakan 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Mobagu," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (2018) : 1.

menerangkan kinerja serta tindakan seorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta.⁴¹ Akuntabilitas tersebut akan terwujud dalam pertanggungjawaban yang disediakan untuk dapat diakses oleh masyarakat.

Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu / kelompok / institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan.⁴² Tahap pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Bulangan Haji sudah mengandung unsur akuntabilitas karena pemerintah Desa Bulangan Haji telah menerapkan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan peraturan dan standar akuntabilitas.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah.⁴³

⁴¹ Zainuddin dan Resmiyati Ansar, "Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Gamtala Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara," *Soedirman Accounting Review* 3, No. 1 (2019) : 1.

⁴² Bevano Kusumasari dkk, Akuntabilitas Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, (Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015), 8.

⁴³ Nafidah, Lina Nasihatun dan Mawar Sungyaningtyas, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, No.1 (2015) : 224.

Mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa Bulangan Haji telah mengandung 4 dimensi yaitu akuntabilitas hukum yang terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Desa Bulangan Haji sudah sesuai dengan kebijakan dan peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas proses terkait dengan proses dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan Desa Bulangan Haji dari rapat dusun dan rapat desa yang dihadiri oleh seluruh perangkat desa dan masyarakat yang berkepentingan sebagai tolak ukur untuk pembangunan satu tahun ke depan. Selain itu akuntabilitas program juga sudah tertata dengan baik, melihat seluruh program yang sudah dijalankan serta program yang ditangguhkan dengan program yang lain sudah memenuhi prosedur. Kemudian akuntabilitas kebijakan yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah sesuai.

Dalam melaksanakan pertanggungjawaban mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bulangan Haji sudah sangat baik dan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Pemerintah Desa Bulangan Haji sudah melakukan pertanggungjawaban mengenai setiap alur dana desa. Hal tersebut terbukti dengan adanya laporan realisasi anggaran yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Desa Bulangan Haji.

Selain itu, untuk laporan pertanggungjawaban mengenai alokasi dana desa, pemerintah Desa Bulangan Haji sudah menggunakan sistem aplikasi SISKEUDES dalam menginput data dan sebagai salah satu media pertanggungjawaban. Selain itu, laporan realisasi anggaran setiap tahun akan disediakan dalam bentuk baliho atau banner yang diletakkan di sekitar balai desa. Selama 10 tahun terakhir, tidak

ada permasalahan yang datang dari masyarakat akibat buruknya sistem pertanggungjawaban oleh pemerintah desa sendiri.

Laporan Pertanggung Jawaban mengenai pelaksanaan pembangunan di Desa Bulangan Haji dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran Desa Bulangan Haji yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.3

Laporan Realisasi APBDesa Desa Bulangan Haji Tahun 2019

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA BULANGAN HAJI KECAMATAN PEGANTENAN KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2019				
Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)	
PENDAPATAN				
	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Pendapatan Asli Desa
	2.245.905.645,00	2.041.589.495,00	204.316.150,00	Pendapatan Transfer
	1.448.247.000,00	1.448.247.000,00	0,00	Dana Desa
	26.043.945,00	21.727.795,00	4.316.150,00	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
	571.614.700,00	571.614.700,00	0,00	Alokasi Dana Desa
	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
	50.000.000,00	51.372.290,71	1.372.290,71	Pendapatan Lain-lain
	2.300.905.645,00	2.097.961.785,71	202.943.859,29	JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA				
	297.173.556,76	296.890.419,13	283.137,63	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
	1.466.398.797,00	1.266.398.797,00	200.000.000,00	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
	384.882.800,00	384.882.800,00	0,00	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
	60.977.500,00	60.977.500,00	0,00	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4.316.150,00	0,00	4.316.150,00	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
	2.213.748.803,76	2.009.149.516,13	204.599.287,63	JUMLAH BELANJA
	87.156.841,24	88.812.269,58	(1.655.428,34)	SURPLUS / (DEFISIT)

PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	12.843.158,76	12.843.158,76	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	(87.156.841,24)	(87.156.841,24)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	1.655.428,34	(1.655.428,34)

Dari Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bulangan Haji Tahun Anggaran 2019 dan data Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja per sumber dana Pemerintah Desa Bulangan Haji Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari DD dapat dilihat jika pelaksanaan pengelolaan pembangunan berdasarkan Dana Desa dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bulangan Haji sudah cukup baik. Pemerintah desa Menyusun pertanggungjawabannya sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang yang berlaku melalui aplikasi SISKEUDES. Laporan pertanggungjawaban dibuat sebagaimana fakta di lapangan.

Berikut Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulangan Haji dalam tahun anggaran 2020.

Tabel 4.4

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Bulangan Haji Tahun 2020

Laporan Realisasi Pelaksanaan

**Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Bulangan Haji
Tahun Anggaran 2020**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.064.749.604,92	2.035.269.534,00	29.480.070,92
	4.2.1.	Dana Desa	1.328.068.000,00	1.328.068.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.328.068.000,00	1.328.068.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29.419.404,92	0,00	29.419.404,92
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupate	29.419.404,92	0,00	29.419.404,92
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	522.262.200,00	522.201.534,00	60.666,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	522.262.200,00	522.201.534,00	60.666,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.182.273,16	1.182.273,16
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	1.182.273,16	1.182.273,16
	4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	1.182.273,16	(1.182.273,16)
		JUMLAH PENDAPATAN	2.071.249.604,92	2.042.951.807,16	28.297.797,76
	5.	BELANJA			
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>466.285.793,00</u>	<u>432.178.365,48</u>	<u>34.107.427,52</u>
1.1		<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u>	<u>446.785.793,00</u>	<u>417.678.365,48</u>	<u>29.107.427,52</u>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	319.920.000,00	319.920.000,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	319.920.000,00	319.920.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	319.920.000,00	319.920.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	297.600.000,00	297.600.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	22.320.000,00	22.320.000,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,	65.505.770,00	38.958.365,48	26.547.404,52

1.1.4	5.2.	Honor PKPKD dan PPKD dll)	64.005.770,00	37.458.365,48	26.547.404,52
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa	7.986.000,00	7.986.000,00	0,00
		Belanja Barang Perlengkapan			
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.211.000,00	3.211.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	580.000,00	580.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	420.000,00	420.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	50.128.970,00	28.250.000,00	21.878.970,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umu	45.878.970,00	24.000.000,00	21.878.970,00
1.1.4	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	331.565,48	331.565,48
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	331.565,48	(331.565,48)
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	5.890.800,00	890.800,00	5.000.000,00
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	5.890.800,00	890.800,00	5.000.000,00
1.1.4	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.4	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.560.023,00	0,00	2.560.023,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.560.023,00	0,00	2.560.023,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.560.023,00	0,00	2.560.023,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.060.023,00	0,00	2.060.023,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	500.000,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	6.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan	170.000,00	170.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.4.10	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.4.10	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
<u>2</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.118.780.400,00</u>	<u>1.117.580.400,00</u>	<u>1.200.000,00</u>
<u>2.1</u>		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>194.858.000,00</u>	<u>194.858.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.2		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	0,00	0,00	0,00
2.1.2	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.1.2	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.1.2	5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00
2.1.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	194.858.000,00	194.858.000,00	0,00
2.1.6	5.3.	Belanja Modal	194.858.000,00	194.858.000,00	0,00
2.1.6	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	194.858.000,00	194.858.000,00	0,00
2.1.6	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.6	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa	53.615.000,00	53.615.000,00	0,00
2.1.6	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	140.643.000,00	140.643.000,00	0,00
<u>2.2</u>		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>68.572.000,00</u>	<u>67.372.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.900.000,00	5.700.000,00	1.200.000,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	4.700.000,00	1.200.000,00
2.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.700.000,00	500.000,00	1.200.000,00
2.2.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.700.000,00	500.000,00	1.200.000,00
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.2.1	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.1	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.1	5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	53.672.000,00	53.672.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00

2.2.2	5.3.	Belanja Modal	30.672.000,00	30.672.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	30.672.000,00	30.672.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	8.772.000,00	8.772.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.2.4	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.2.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.2.4	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	785.876.000,00	785.876.000,00	0,00
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	785.876.000,00	785.876.000,00	0,00
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	785.876.000,00	785.876.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	785.876.000,00	785.876.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	254.785.000,00	254.785.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	529.066.000,00	529.066.000,00	0,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	62.974.400,00	62.974.400,00	0,00
2.4.3		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	62.974.400,00	62.974.400,00	0,00
2.4.3	5.3.	Belanja Modal	62.974.400,00	62.974.400,00	0,00
2.4.3	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	62.974.400,00	62.974.400,00	0,00
2.4.3	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	750.000,00	750.000,00	0,00
2.4.3	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
2.4.3	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	31.584.400,00	31.584.400,00	0,00
2.4.3	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sew	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2.6.2	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2.6.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2.6.2	5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat L	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	19.075.000,00	19.075.000,00	0,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.075.000,00	19.075.000,00	0,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	19.075.000,00	19.075.000,00	0,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00

3.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.2.3	5.3.	Belanja Modal	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00
3.2.3	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00
3.2.3	5.3.9.03.	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Ke	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
3.3.5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik	0,00	0,00	0,00
3.3.5	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
3.3.5	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00
3.3.5	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	0,00	0,00	0,00
3.3.5	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa	0,00	0,00	0,00
3.3.5	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	0,00	0,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	0,00	0,00
4.3.2		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kejiata	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.155.000,00	3.155.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.345.000,00	3.345.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kejiata	662.500,00	662.500,00	0,00
4.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.182.500,00	1.182.500,00	0,00
4.5			0,00	0,00	0,00

4.5.1		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	0,00	0,00	0,00
4.5.1	5.2.		0,00	0,00	0,00
4.5.1	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.5.1	5.2.1.01.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
4.5.1	5.2.1.05.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
4.5.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
4.5.1	5.2.1.09.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
		Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			
4.5.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
4.5.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Keziata Belanja	0,00	0,00	0,00
4.5.1	5.2.2.04.	Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	0,00	0,00	0,00
4.5.1	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
4.5.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	0,00	0,00	0,00
4.5.1	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	0,00	0,00	0,00
4.5.1	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.5.1	5.3.9.02.	Belanja Khusus Olahraga	0,00	0,00	0,00
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	463.763.840,26	462.862.000,00	901.840,26
5.1		<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana Kegiatan</u>	117.562.000,00	117.562.000,00	0,00
5.1.1		Penanggulangan Bencana	117.562.000,00	117.562.000,00	0,00
5.1.1	5.2.		80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
5.1.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
5.1.1	5.2.7.01.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
5.1.1	5.4.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	37.562.000,00	37.562.000,00	0,00
5.1.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	37.562.000,00	37.562.000,00	0,00
5.1.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	37.562.000,00	37.562.000,00	0,00
5.3			346.201.840,26	345.300.000,00	901.840,26
5.3.1		Belanja Tidak Terduga	346.201.840,26	345.300.000,00	901.840,26
		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>			
5.3.1	5.2.	Penanganan Keadaan Mendesak	1.840,26	0,00	1.840,26
5.3.1	5.2.7.		1.840,26	0,00	1.840,26
5.3.1	5.2.7.01.	Belanja Barang dan Jasa	1.840,26	0,00	1.840,26
5.3.1	5.4.		346.200.000,00	345.300.000,00	900.000,00
5.3.1	5.4.1.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	346.200.000,00	345.300.000,00	900.000,00
5.3.1	5.4.1.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	346.200.000,00	345.300.000,00	900.000,00
		Belanja Tidak Terduga			
		Belanja Tidak Terduga			
		Belanja Tidak Terduga			
		JUMLAH BELANJA	2.074.405.033,26	2.038.195.765,48	36.209.267,78
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3.155.428,34)	4.756.041,68	(7.911.470,02)
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.155.428,34	3.155.428,34	0,00

6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.155.428,34	3.155.428,34	0,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.155.428,34	3.155.428,34	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN		3.155.428,34	3.155.428,34	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	7.911.470,02	(7.911.470,02)

Melihat dari data Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bulangan Haji tahun anggaran 2020 dan data Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja per sumber dana Pemerintah Desa Bulangan Haji tahun anggaran 2020 yang bersumber dari DD dapat dilihat jika anggaran untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk tahun 2020 mengalami penurunan jumlah anggaran dari tahun 2019. Dimana pada tahun 2019 pada bidang pelaksanaan pembangunan mendapatkan anggaran sebesar Rp 1.466.398.797,00 sedangkan pada tahun 2020 Desa Bulangan Haji memperoleh anggaran sebesar Rp 1.118.780.400,00. Penurunan tersebut tentunya memiliki sebab yang jelas.

Penurunan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Bulangan Haji pada tahun 2020 disebabkan oleh factor utama yaitu terjadinya pandemi covid-19. Wabah tersebut menyebabkan Peraturan Pemerintah atau PP menyerukan agar anggaran kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di masyarakat sementara waktu sebgaiian dialokasikan untuk pandemi covid-19. Hal tersebut telah dibuktikan melalui data realisasi anggaran pada tahun 2020.

Dari data realisasi anggaran per sumber dana yang berasal dari DD dapat dilihat jika terjadi peningkatan anggaran yang cukup besar pada Bidang Penanggulangan Bencana Darurat yaitu yang semula hanya sebesar Rp 4.316.150,00

pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar RP 463.763.840,26. Hal tersebut menjelaskan bahwa pada tahun bersangkutan anggaran dikeluarkan untuk penanggulangan bencana yang mendesak yaitu covid-19. Meskipun Sebagian anggaran keuangan Desa Bulangan Haji untuk bidang pelaksanaan pembangunan dipangkas untuk kepentingan penanggulangan bencana covid-19, Desa Bulangan Haji tetap melaksanakan kegiatan pelaksanaan yang telah disepakati pada RKPDes sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi anggaran yang telah tercantum dalam laporan tertulis.

Penurunan anggaran pada bidang pembangunan yang terjadi di tahun 2020 dari tahun 2019 tentunya memberikan dampak yang sangat besar terhadap pembangunan Desa Bulangan Haji. Pasalnya beberapa pembangunan di Desa Bulangan Haji harus ditangguhkan terlebih dahulu untuk mengutamakan keadaan yang lebih mendesak pada saat itu. Namun Pemerintah Desa Bulangan Haji tetap melaksanakan tanggungjawabnya untuk menggunakan anggaran tersebut sesuai dengan situasi yang diperintah oleh pemerintah pusat yaitu terlihat pada peningkatan dan realisasi anggaran yang telah diperuntukkan pada penanggulangan pandemi covid-19.